

LAMPIRAN

Lampiran 1 Mapping Jurnal Penelitian Terdahulu

I	II	III	IV	V	VI
(Penulis, Judul, Tahun)	Abstrak	Tujuan Penelitian	Variabel	Metodologi	Hasil dan Pembahasan
1.Yuni Kurniasih Dkk Implementasi Keijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal 2018	Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk desa, bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten ¹ . ADD diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan desa untuk membiayai	Untuk menjelaskan pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong dan faktor	Variabel yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan dengan perspektif top-down dari George C. Edward III	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margasari, Kabupaten Tegal, berdasarkan analisis Model Edward III, secara umum belum efektif. Hal ini terlihat dari lima indikator implementasi, di mana tiga aspek dinilai belum optimal, yaitu: keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ADD yang belum partisipatif, masalah pelaporan dan pertanggungjawaban yang

	berbagai pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat². Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan ADD di Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal	penghambat pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Untuk merumuskan upaya optimalisasi pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal			sering terlambat , serta kemanfaatan ADD terhadap kemandirian desa yang rendah karena masyarakat cenderung bergantung pada dana transfer dan partisipasi swadaya gotong royong menurun. Meskipun indikator kesesuaian alokasi dengan pedoman dan tupoksi Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sudah baik , kinerja Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional dinilai kurang maksimal. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi juga belum berjalan optimal, dengan faktor penghambat utama meliputi kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana di desa yang rendah , minimnya intensitas sosialisasi kebijakan secara
--	--	---	--	--	--

					luas sampai ke tingkat desa , serta rendahnya intensitas koordinasi antar pelaksana di luar perangkat desa. Meskipun demikian, faktor pendorong berupa ketersediaan sumber daya finansial, sarana prasarana, konsistensi komunikasi, dan pemahaman pelaksana dinilai sudah cukup memadai
2.Diana Putri Wahyudi Implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Pemberdayaan Bum Desa Dari provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Kediri	Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dari Provinsi Jawa Timur, yang menyediakan modal bagi BUM Desa di Kabupaten Kediri untuk pengembangan usaha, dinilai masih belum optimal. Ketidakoptimalan ini disebabkan oleh dua masalah utama:	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Kediri.	Variabel yang digunakan dalam penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK) untuk Pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Kediri didasarkan pada Model Proses Implementasi	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Kediri masih belum optimal. Meskipun koordinasi antarinstansi pendukung sudah baik , kendala utama terletak pada sisi BUM Desa itu sendiri, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang

2025	keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki BUM Desa untuk mengelola unit usaha secara maksimal, serta banyaknya regulasi atau aturan dalam pelaksanaan program yang membuat pengurus BUM Desa merasa kesulitan, terutama dalam hal pengadministrasian.		Kebijakan (A Model of the Policy Implementation Process) dari Van Meter dan Van Horn (1975).		memadai untuk mengelola unit usaha secara maksimal. Faktor penghambat signifikan lainnya adalah banyaknya aturan dalam pelaksanaan program BKK yang membuat pengurus BUM Desa merasa kesulitan, terutama dalam hal pengadministrasian.
3.. Rizal Fardani Sigit Wahyu Kartiko. Wijayanti Heny Inovasi Pengelolaan Bantuan Keuangan:	Alokasi bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Pati kepada desa cenderung meningkat tiap tahun kecuali pada 2020 karena refocusing Covid-19. Penelitian ini	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Kabupaten Pati mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada desa, termasuk proses,	Kebijakan Pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus ke Desa.	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengalokasian bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Pati kepada desa masih belum optimal, ditandai dengan meningkatnya temuan pemeriksaan serta lemahnya regulasi, tata

Reformasi Dan Reformulasi Pengalokasian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pati)” 2023	menganalisis kebijakan pengalokasian bantuan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa bantuan keuangan khusus idealnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) desa, serta perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penentuan alokasi, lokasi kegiatan, penerima, satuan biaya, prioritas wilayah, dan target output agar pengelolaannya	pertimbangan, dan mekanisme penentuannya. Penelitian ini juga bertujuan menggambarkan praktik dan kendala yang terjadi di lapangan agar diperoleh pemahaman yang jelas mengenai efektivitas kebijakan tersebut.			laksana, dan kapasitas sumber daya manusia. Bantuan keuangan khusus selama ini lebih banyak diarahkan untuk memenuhi aspirasi pokok pikiran anggota dewan dan janji kepala daerah kepada konstituen, sehingga belum memiliki formulasi yang jelas terkait penentuan besaran anggaran, lokasi kegiatan, maupun indikator kinerja. Melalui analisis fenomenologis, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan anggaran, kurangnya penggunaan teknologi informasi, serta belum adanya variabel berbasis kinerja membuat proses pengalokasian bantuan keuangan khusus menjadi kurang tepat sasaran dan kurang mendukung pencapaian
---	---	---	--	--	---

	lebih efektif dan terukur.				Standar Pelayanan Minimum (SPM) desa.
4.Khalida Shuha Analisis Pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Desa Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman) 2018	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di lima desa yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya dalam mengatasi pengelolaan dana desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di lima desa yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya dalam mengatasi pengelolaan dana desa.		Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tahapan pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hanya tahap perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

	Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan				2. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, jaringan internet dan pemahaman masyarakat. 3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatkan tingkat pendidikan, dan pelatihan.
--	--	--	--	--	--

	Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan, dan pelatihan				
--	---	--	--	--	--

5. Johan Satriajaya, Lilik Handajani, dan I Nyoman Nugraha Ardana Putra “Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” 2018	Penelitian ini menganalisis kebijakan bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah kabupaten kepada desa di Samanta, yang ternyata menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologi-hermeneutika melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa pengelolaan bantuan tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan karena ketidakkonsistenan	Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten dikelola di desa-desa Kabupaten Samanta, mengungkap munculnya perilaku menyimpang dalam proses tersebut, serta menilai dampak dan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.		Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil dan pembahasan artikel menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Samanta tidak berjalan sesuai regulasi karena pemerintah daerah tidak konsisten dalam menerapkan aturan, serta menggunakan diskresi dan kepentingan politik dalam penentuan jenis kegiatan, lokasi, hingga pelaksana proyek. Bantuan yang seharusnya memberdayakan masyarakat justru dikelola oleh pihak luar desa, sementara pemerintah desa tetap dibebani tanggung jawab administrasi dan pertanggungjawaban, sehingga memicu terjadinya penyimpangan, manipulasi SPJ, tekanan pekerjaan, serta berbagai bentuk
---	--	--	--	--	---

	pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi. Dominasi kepentingan politik dan penggunaan diskresi menjadikan proses pemberdayaan desa hanya bersifat semu sehingga tujuan utama kebijakan tidak tercapai, dan diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah kabupaten agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan tujuan pembangunan desa.				dysfunctional behavior. Kondisi ini menunjukkan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan anggaran desa, serta menimbulkan dampak sosial dan administratif yang merugikan pemerintah desa, sehingga implementasi kebijakan jauh dari tujuan awal pembangunan dan pemberdayaan desa.
6. Muhammad Imanuddin Kandias Saraan, Sri Suwitri, & A.P.	Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar belum	Penelitian bertujuan Tujuan penelitian dalam artikel tersebut adalah:	Faktor Sumber Daya Disposisi / Sikap Pelaksana Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perumnas Simalingkar belum berjalan

Tri Yuniningsih Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang 2019	optimal karena terhambat oleh keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan penelusuran dokumen, penelitian ini mengungkap bahwa tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan belum tercapai secara maksimal. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama	Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Faktor-faktor yang dikaji mencakup sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)	optimal karena berbagai tujuan kebijakan seperti peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan partisipasi gotong royong belum tercapai secara maksimal. Penelitian menemukan bahwa masih terdapat keterlambatan realisasi program, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD dan PKK. Selain itu, beberapa kegiatan yang dianggarkan, seperti pembangunan jaringan internet, belum terselesaikan. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan ADD meliputi keterbatasan pemahaman
---	---	--	---	---

	kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan ADD di desa tersebut.				implementor, rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa, tidak maksimalnya koordinasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang mendukung sehingga keseluruhan implementasi kebijakan masih jauh dari target yang ditetapkan.
7.Sinta Nofiana Saputri Sri Rahayu Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap	Artikel ini membahas bagaimana Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah memengaruhi Belanja Desa di Kecamatan Bawang selama tahun 2018–2020 . Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif	Tujuan utama penelitian dalam artikel tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Desa pada desa-desa di Kecamatan	Penelitian ini menempatkan Belanja Desa sebagai variabel yang ingin dijelaskan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhinya, digunakan tiga variabel independen, yaitu Dana Desa,	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kuantitatif	Penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Desa. Artinya, ketika ketiga variabel ini diuji bersama-sama, semuanya memiliki kontribusi terhadap naik turunnya belanja desa.

Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018–2020) 2023	menggunakan 60 data observasi dari seluruh desa di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Desa. Namun, secara terpisah hanya Dana Desa yang terbukti berpengaruh, sementara Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Belanja Desa	Bawang selama tahun 2018–2020, baik secara simultan maupun secara parsial	Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Ketiga variabel tersebut dipilih karena merupakan sumber utama pendapatan desa yang diduga berperan dalam menentukan besarnya pengeluaran desa setiap tahunnya.		Namun, ketika diuji secara terpisah, hasilnya berbeda. Dana Desa terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa, sehingga semakin besar Dana Desa yang diterima, semakin besar pula kemampuan desa dalam membiayai kegiatannya. Sebaliknya, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Dengan kata lain, besar kecilnya kedua jenis pendapatan tersebut tidak otomatis menentukan besarnya belanja desa. .
8. Yudianto Anggoro	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis	Penelitian ini dilakukan untuk memahami sejauh	Indeks Desa membangun . Variabel	Metode Penelitian Menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa,

Analisis Pengaruh Dana Desa Dan Bantuan keuangan khusus (BKK) Keistimewaaan Kalurahan Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunung Kidul 2024	pengaruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Keistimewaan Kalurahan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian menggunakan data panel 144 desa selama periode 2019–2023, yang dianalisis dengan model regresi data panel melalui pendekatan Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	mana kebijakan keuangan desa mampu mendorong pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Fokus utamanya adalah menilai bagaimana Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus Keistimewaan Kalurahan berperan dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM). Melalui analisis tersebut, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi perbedaan perkembangan IDM antara desa	Independen : Dana Desa , Alokasi Dana Desa , Bantuan Keuangan Khusus dana Keistimewaan Kalurahan	Metode Kuantitatif	dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gunungkidul. Melalui analisis regresi data panel dengan model terbaik yaitu Fixed Effect Model, ditemukan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan dalam mendorong peningkatan IDM. Hal ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran yang tepat pada pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik mampu memperkuat dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi di desa.
---	---	---	---	---------------------------	---

	berpengaruh positif dan signifikan terhadap kenaikan IDM, sementara BKK Keistimewaan Kalurahan memberikan pengaruh positif namun tidak selalu signifikan, terutama bergantung pada status desa. Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap IDM. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan anggaran desa untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas	yang mendapatkan bantuan keistimewaan dan desa yang tidak menerima bantuan tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas pengelolaan anggaran desa dalam mendukung kemajuan dan kemandirian desa.			Sementara itu, Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan juga berpengaruh positif, namun tingkat signifikansinya bervariasi antar kategori desa. Pada desa berstatus berkembang dan maju, BKK DAIS menunjukkan pengaruh lebih kuat terhadap IDM dibandingkan desa berstatus mandiri. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar program BKK lebih berfokus pada pengembangan budaya dan kelembagaan sehingga kontribusinya terhadap skor IDM di desa mandiri tidak sebesar di desa lain. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh simultan terhadap peningkatan IDM, dengan nilai koefisien
--	--	--	--	--	---

	hidup masyarakat desa.				determinasi (R^2) yang tinggi pada beberapa model, yaitu hingga 73,6% , menunjukkan bahwa sebagian besar variasi IDM dapat dijelaskan oleh Dana Desa, ADD, dan BKK Keistimewaan
9. Maulida Candra Dewi Indah Dewi Nurhayati Khojanah Hasan Analisis Dana Desa , Alokasi Dana Desa dan < Bagi Hasil Pajak dan retribusi Dalam Meningkatkan Belanja Modal (Studi Kasus	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berperan dalam meningkatkan belanja modal di Desa Tamanharjo. Penelitian ini menggunakan variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh dalam meningkatkan belanja modal di Desa Tamanharjo Malang . Penelitian ini berfokus pada hubungan ketiga	Penelitian ini menggunakan belanja modal sebagai variabel terikat, yang dipengaruhi oleh tiga variabel bebas: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak serta Retribusi . Ketiga sumber pendanaan tersebut dianalisis untuk melihat perannya dalam	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak serta Retribusi mengalami peningkatan pada tahun 2017–2019, belanja modal Desa Tamanharjo justru mengalami penurunan . Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan dana tidak otomatis diikuti oleh peningkatan belanja modal, sehingga pengelolaan anggaran desa belum optimal dalam mendukung

di Desa Tamanharjo Malang) 2021	yang dikaitkan dengan peningkatan belanja modal, dan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak desa Tamanharjo, sedangkan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran tahun 2017–2019. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dengan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif	sumber pendanaan desa tersebut terhadap peningkatan belanja modal, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan dan kualitas layanan publik di desa	meningkatkan belanja modal di Desa Tamanharjo		pembangunan fisik dan peningkatan pelayanan publik.
10. Simon Nisja Putra Zai	Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan SIMDA	Penelitian ini bertujuan menganalisis	Perilaku Pengguna dalam Penerimaan	Metode Penelitian Menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transformasi penggunaan

User Behavior in The Acceptance of Technology on Regional Management Information System (SIMDA-Integrated) in Surakarta City Government (internasional journal of seocology) 2021	di Pemerintah Kota Surakarta dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, manfaat, kualitas layanan, dan daya tarik afektif yang mendorong konsistensi pemakaian sistem. Sikap inklusif, pandangan mengenai efisiensi, serta kemampuan berinovasi pegawai turut membangun kesadaran akan pentingnya pemanfaatan e-government untuk mewujudkan good governance. Dampak utama dari penggunaan sistem ini adalah meningkatnya	Perilaku Pengguna dalam Penerimaan Teknologi pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Terintegrasi) di Pemerintah Kota Surakarta	Teknologi pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Terintegrasi) di Pemerintah Kota Surakarta	Metode Kualitatif	sistem informasi menuju SIMDA-integrated di Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan bahwa kesadaran pengguna menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Pegawai konsisten menggunakan sistem karena menilai kualitas layanan, kenyamanan, kemudahan, serta manfaat yang diperoleh dapat mendukung kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kesamaan pandangan mengenai budaya demokratis dan persepsi positif terhadap kegunaan sistem turut memperkuat niat pengguna untuk merekomendasikan serta mengoptimalkan pemanfaatan SIMDA. Pelatihan, sosialisasi berkala, dan uji coba yang dilakukan
---	--	--	---	--------------------------	---

	akuntabilitas, baik melalui niat pengguna untuk merekomendasikan sistem kepada rekan kerja maupun kesadaran akan pentingnya transparansi layanan publik. Temuan ini melahirkan kebaruan berupa model pengukuran akuntabilitas pemerintah berbasis perilaku pengguna dalam mengadopsi sistem baru. Untuk memperkuat implementasi, penelitian merekomendasikan adanya pendampingan berkala, pelatihan, sosialisasi berkelanjutan, serta				pemerintah daerah terbukti meningkatkan kesadaran serta minat pegawai dalam menggunakan sistem. Para pengguna merasakan keunggulan sistem, minim risiko, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan. Penelitian ini menemukan bahwa inklusivitas, sikap positif, efisiensi, dan kemampuan berinovasi mendorong pengguna untuk berpartisipasi aktif, konsisten menggunakan sistem, serta menumbuhkan akuntabilitas melalui penerapan e-government.
--	--	--	--	--	---

	peningkatan intensitas monitoring dan evaluasi agar pemanfaatan SIMDA lebih optimal dan berkelanjutan.				
--	--	--	--	--	--

Lampiran 1 Pedoman wawancara

Pedoman Wawancara

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta bagian hasil pajak dan retribusi daerah di Desa Kletek dilakukan?
2. Apakah pengelolaan DD, ADD, dan bagi hasil pajak/retribusi sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 23 Tahun 2024?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana tersebut?
4. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Kletek?
5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, ADD, atau bagi hasil pajak/retribusi? Jika ada, bagaimana cara pemerintah desa mengatasinya?
6. Bagaimana proses penyaluran dan penggunaan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) tersebut di tingkat desa?
7. Apakah di Desa Kletek Terdapat penggunaan dana kompensasi pembangunan Frontage Road dan jika ada apakah telah sesuai dengan pedoman dalam Perbup No. 23 Tahun 2024?
8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan dana BKK tersebut?
9. Apa hasil atau manfaat yang telah dirasakan masyarakat Desa Kletek dari adanya dana kompensasi pembangunan Frontage Road ini?
10. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan bantuan keuangan umum dan khusus di Desa Kletek?
11. Faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pengelolaan bantuan keuangan tersebut?
12. Bagaimana peran aparatur desa dan masyarakat dalam mendukung efektivitas pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan khusus?
13. Apakah ada upaya dari pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut?
14. Menurut Anda, apa langkah yang perlu dilakukan agar pengelolaan bantuan keuangan umum dan khusus di Desa Kletek dapat lebih optimal di masa mendatang?

15. Bagaimana dampak Pengelolaan bantuan Keuangan umum dan khusus Terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di Desa Kletek ?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama: Bapak Vicky

Jabatan : Sekertaris Desa

1. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta bagian hasil pajak dan retribusi daerah di Desa Kletek dilakukan?

Jawaban : proses perencanaan disini kami memiliki 2 dokumen utama perencanaan yaitu RPJMdes (rencana pembangunan jangka menengah desa) yang disesuaikan dengan masa jabatan pak Kades, sedangkan untuk tiap tahun kita pakai dokumen RKPdes (rencana kerja pemerintah desa), kedua dokumen jika sudah disahkan lalu kita membuat APBDes (Anggaran Perencanaan Belanja desa) yang dimana data tersebut sudah tercantum rencana anggaran desa selama satu tahun kedepan.

2. Apakah pengelolaan DD, ADD, dan bagi hasil pajak/retribusi sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 23 Tahun 2024?

Jawaban : pengelolaan DD, ADD dan bagi hasil pajak/retribusi sudah sesuai dengan aturan terbaru No. 23 tahun 2024.

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana tersebut?

Jawaban : Masyarakat, Pemerintah desa, lembaga, tokoh masyarakat, RT dan RW semuanya terlibat dalam proses tersebut.

4. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Kletek?

Jawaban : Disesuaikan dengan APBDes setiap tahunnya, dana yang sudah disalurkan oleh pemerintah ke rekening desa dicairkan menggunakan SPB (surat permintaan pembayaran) yang diverifikasi oleh sekretaris, bendahara, dan kepala desa.

5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, ADD, atau bagi hasil pajak/retribusi? Jika ada, bagaimana cara pemerintah desa mengatasinya? Jawaban : Masih terdapat perhitungan RAB yang memerlukan ketepatan standar harga yang tidak terupdate, cara mengatasinya selalu menentukan standar harga , terus diupdate sesuai harga pasar.

6. Bagaimana proses penyaluran dan penggunaan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) tersebut di tingkat desa?

Jawaban : ada beberapa proses penyaluran. Pada tahun 2024 BKK desa kletek disalurkan langsung ke kelompok masyarakat tidak melalui APBDes.

7. Apakah di Desa Kletek Terdapat penggunaan dana kompensasi pembangunan Frontage Road dan jika ada apakah telah sesuai dengan pedoman dalam Perbup No. 23 Tahun 2024?

Jawaban : di desa kletek tidak ada pembangunan frontage road, namun kita alihkan BKK yang lain seperti pavingisasi dan pembuatan gorong-gorong, dan untuk pendanaan sudah sesuai dengan peraturan no.23 tahun 2024.

8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan dana BKK tersebut?

Jawaban : bentuk pengawasan biasanya didampingi oleh Camat, dinas terkait, dan inspektorat.

9. Apa hasil atau manfaat yang telah dirasakan masyarakat Desa Kletek dari adanya dana kompensasi pembangunan Frontage Road ini?

Jawaban : bentuk BKK sudah dijelaskan sebelumnya yaitu pavingisasi dan pembuatan gorong-gorong, tentu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang memang masih terdampak banjir.

10. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan bantuan keuangan umum dan khusus di Desa Kletek?

Jawaban : Perencanaan yang matang dan tepat tentu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan, pelaksanaan yang sesuai aturan mengurangi resiko fraud dalam anggaran, selain itu tentu SDM pelaksana yang tepat akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

11. Faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pengelolaan bantuan keuangan tersebut?

Jawaban : faktor hambatan dalam pengelolaan tentunya karena harga yang tidak update dengan pasar, bisa menjadi kendala dalam suatu pembangunan tentu akan kurang maksimal.

12. Bagaimana peran aparatur desa dan masyarakat dalam mendukung efektivitas pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan khusus?

Jawaban : sebagai aparatur desa pasti akan melakukan pendampingan dalam pengelolaan dana desa, agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 13.** Apakah ada upaya dari pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut?

Jawaban : Ada, kita selalu memusyawarahkan kepada masyarakat desa sebelum melakukan pembangunan atau menyalurkan dana bantuan kepada daerah yang memerlukan bantuan.

- 14.** Menurut Anda, apa langkah yang perlu dilakukan agar pengelolaan bantuan keuangan umum dan khusus di Desa Kletek dapat lebih optimal di masa mendatang?

Jawaban : tetap mengikuti peraturan pemerintah dan bersosialisasi dengan masyarakat bahwa untuk pengelolaan bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tidak mengedepankan ekspektasi masyarakat.

- 15.** Bagaimana dampak Pengelolaan bantuan Keuangan umum dan khusus Terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di Desa Kletek ?

Jawaban : Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya dana bantuan tentu sangat terbantu, dan dampak yang kami rasakan sebagai pengelola dana bantuan juga senang dikarenakan dana bantuan sudah dialokasikan sesuai dengan peraturan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Informan 2**Nama: Nanik Damayanti****Jabatan : Kaur Keuangan / Bendahara Desa**

1. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta bagian hasil pajak dan retribusi daerah di Desa Kletek dilakukan?

Jawaban : Proses perencanaan Perencanaan dimulai dari usulan tingkat RT, dikumpulkan di dusun, dibahas dalam Musrenbangdes, lalu dimasukkan ke RKPD/RPJMD desa dan APBDDesa. Sumber dana seperti PAD, ADD, dan bantuan lainnya dituangkan dalam APBDDes dan dialokasikan ke bidang penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, bantuan keuangan, dan tak terduga. Pelaksanaan pekerjaan fisik/ non-fisik mengikuti prioritas hasil musyawarah tersebut.

2. Apakah pengelolaan DD, ADD, dan bagi hasil pajak/retribusi sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 23 Tahun 2024?

Jawaban : Sudah sesuai dan mengikuti peraturan No. 23 tahun 2024.

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana tersebut?

Jawaban : tentunya pak kades, sekretaris desa, perangkat desa sampai tingkat dusun/RT/RW, lembaga pengawas dan perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, serta masyarakat peserta Musrenbangdes. Untuk pelaksanaan fisik dibentuk Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan bendaharawan desa. Pengawasan internal dilakukan oleh BPD dan partisipasi masyarakat melalui musyawarah serta koordinasi dengan kecamatan/kabupaten.

4. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Kletek?

Jawaban : bendahara desa bertugas menyusun anggaran, pembukuan, laporan realisasi keuangan, dan pertanggungjawaban yang kemudian dilaporkan pada akhir tahun, laporan pertanggungjawaban juga disampaikan dalam LPPD akhir masa jabatan dan melalui mekanisme pelaporan ke kecamatan/kabupaten sesuai ketentuan. Selain itu setiap perubahan anggaran (jika ada) dilakukan sesuai ketentuan.

5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, ADD, atau bagi hasil pajak/retribusi? Jika ada, bagaimana cara pemerintah desa mengatasinya? Jawaban :

keterbatasan PAD sehingga APBDes sering tidak sesuai rencana, keterbatasan dana ADD (skala kecil), dan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang pelaksanaan program sehingga partisipasi tidak selalu optimal. Tetapi kami tetap memberikan sosialisasi, musyawarah, penggalangan partisipasi, dan koordinasi dengan instansi kabupaten jika diperlukan

6. Bagaimana proses penyaluran dan penggunaan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) tersebut di tingkat desa?

Jawaban : penyaluran dari rekening desa ke pelaksana kegiatan, lalu membelanjakan sesuai APBDes lalu mulai pembangunan.

7. Apakah di Desa Kletek Terdapat penggunaan dana kompensasi pembangunan Frontage Road dan jika ada apakah telah sesuai dengan pedoman dalam Perbup No. 23 Tahun 2024?

Jawaban : Kita adanya pembangunan pavingisasi dan sudah disesuaikan dengan peraturan No.23 tahun 2024, dan setiap titik pembangunan sudah kami pasang papan informasi secara detail termasuk nominal pembangunan.

8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan dana BKK tersebut?

Jawaban : bentuk pengawasannya aparat desa langsung survei ke lapangan dan melakukan pengecekan sampai pembangunan selesai dilakukan.

9. Apa hasil atau manfaat yang telah dirasakan masyarakat Desa Kletek dari adanya dana kompensasi pembangunan Frontage Road ini?

Jawaban : sangat terbantu, apalagi wilayah yang memang banjir sekarang sudah ditinggikan dan dipaving, jadi masyarakat senang sekali.

10. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan bantuan keuangan umum dan khusus di Desa Kletek?

Jawaban : koordinasi antar pemerintah desa ke masyarakat yang menerima bantuan dapat saling membantu agar pembangunan berjalan dengan semestinya.

11. Faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pengelolaan bantuan keuangan tersebut?

Jawaban : BKK tahun lalu sempat ada kendala di ekspektasi masyarakat yang menjadi kontra dengan rencana dari pemerintah desa, namun tetap kami sampaikan bahwa anggaran BKK dibelanjakan sesuai dengan aturan pemerintah.

12. Bagaimana peran aparat desa dan masyarakat dalam mendukung efektivitas pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan khusus?

Jawaban : Tahap awal memang kita memiliki form pengajuan bantuan dari RT/RW kepada desa, dan desa memberikan dana bantuan sesuai yang diusulkan atau diajukan oleh masyarakat, jadi menurut saya dalam hal ini sudah efektif karena masyarakat terbantu sesuai dengan yang mereka usulkan.

13. Apakah ada upaya dari pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut?

Jawaban : sudah ada, setiap ada pembangunan kita membuat papan informasi pembangunan, banner anggaran, dan kita juga publikasikan melalui media sosial.

14. Menurut Anda, apa langkah yang perlu dilakukan agar pengelolaan bantuan keuangan umum dan khusus di Desa Kletek dapat lebih optimal di masa mendatang?

Jawaban : mungkin nominal bisa disesuaikan dengan jumlah RT perdesa, jadi dengan adanya pengajuan dari masyarakat kami sebagai pemerintah desa bisa membantu secara optimal dengan nominal yang ada.

15. Bagaimana dampak Pengelolaan bantuan Keuangan umum dan khusus Terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di Desa Kletek ?

Jawaban : sudah berdampak positif dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya BKK dari desa kletek.

Informan 3

Nama : Alfian Sukrianda. S.Si

Jabatan : Kaur Perencanaan

1. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta bagian hasil pajak dan retribusi daerah di Desa Kletek dilakukan?

Jawaban : perencanaan dan penganggaran sudah ditetapkan di RPJMDes dan dituangkan di RKPDes, lalu dibuatlah pada APBDes untuk memudahkan pembelanjaan setiap tahunnya.

2. Apakah pengelolaan DD, ADD, dan bagi hasil pajak/retribusi sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 23 Tahun 2024?

Jawaban : menurut saya sudah sesuai dengan peraturan No.23 tahun 2024

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana tersebut?

Jawaban : Kepala desa, sekretaris, bendahara, saya sebagai kaur perencanaan, dan masyarakat

4. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Kletek?

Jawaban : biasanya pelaporan penggunaan dana dari kaur pelaksana diserahkan ke bendahara dan dicek kembali sesuai dengan APBDes yang sudah dibuat

5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, ADD, atau bagi hasil pajak/retribusi? Jika ada, bagaimana cara pemerintah desa mengatasinya? Jawaban : kendala biasanya terjadi karena nominal bantuan yang kecil yang membuat pembanguna tidak optimal, dan adanya kecemburuan antar RT yang sama-sama membutuhkan bantuan, Solusinya kami memberikan sosialisasi dan pengertian pada masyarakat bahwa yang akan kami dahulukan adalah wilayah yang memang urgensi nya sudah tinggi.

6. Bagaimana proses penyaluran dan penggunaan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) tersebut di tingkat desa?

Jawaban : penyaluran BKK mengikuti ketentuan peraturan bupati dan dicatat di APBDes sebelum direalisasikan oleh bendahara dan tim teknis desa.

7. Apakah di Desa Kletek Terdapat penggunaan dana kompensasi pembangunan Frontage Road dan jika ada apakah telah sesuai dengan pedoman dalam Perbup No. 23 Tahun 2024?

Jawaban : disini tidak ada pembangunan frontage road, jadi tidak ada kompensasi dari pembangunan tersebut, untuk BKK disini lebih ke pavingisasi, dan pembuatan saluran air

8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan dana BKK tersebut?

Jawaban : Pengawasan dilakukan melalui pembukuan dan laporan realisasi oleh kaur keuangan/bendahara, kontrol internal oleh BPD dan lembaga desa, sosialisasi dan musyawarah publik, serta pembinaan/koordinasi dengan kecamatan dan kabupaten. Untuk BKK yang bersumber atau diatur kabupaten, pengawasan administratif juga melibatkan SKPD pembina di tingkat kabupaten sesuai ketentuan Perbup.

9. Apa hasil atau manfaat yang telah dirasakan masyarakat Desa Kletek dari adanya dana kompensasi pembangunan Frontage Road ini?

Jawaban : manfaat ADD/BKK berupa perbaikan sarana dan prasarana paving, gorong-gorong, lapangan, peningkatan pelayanan pemerintahan desa, kesempatan kerja lokal.

10. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan bantuan keuangan umum dan khusus di Desa Kletek?

Jawaban : tentu seperti partisipasi masyarakat gotong royong, keberadaan tim pelaksana dan perangkat desa yang terstruktur, adanya Musrenbangdes sebagai forum perencanaan, serta dukungan pendanaan dari kabupaten untuk proyek skala besar.

11. Faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pengelolaan bantuan keuangan tersebut?

Jawaban : keterbatasan PAD sehingga APBDes sering tidak sesuai rencana, dana ADD yang relatif kecil untuk beberapa kebutuhan, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat sehingga partisipasi tidak maksimal, dan masih ada kendala teknis pelaksanaan proyek.

12. Bagaimana peran aparat desa dan masyarakat dalam mendukung efektivitas pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan khusus?

Jawaban : peran pemerintah desa agar pengelolaan menjadi efektif biasanya kami melaporkan rencana anggaran kepada masyarakat melalui Musrenbangdes, dan memantau langsung di lokasi pembangunan.

- 13.** Apakah ada upaya dari pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut?

Jawaban : bentuk dari pengupayaan adalah dengan pelaporan realisasi keuangan, pembukuan oleh kaur keuangan, penyusunan APBDes bersama lembaga desa (BPD, tokoh masyarakat), serta sosialisasi dan musyawarah untuk menggalang partisipasi.

- 14.** Menurut Anda, apa langkah yang perlu dilakukan agar pengelolaan bantuan keuangan umum dan khusus di Desa Kletek dapat lebih optimal di masa mendatang?

Jawaban : memperkuat sosialisasi dan literasi anggaran untuk masyarakat, memperbaiki dokumentasi dan mekanisme pelaporan, sinkronisasi lebih erat antara rencana desa (RPJM/RKPD) dan kebijakan kabupaten agar penyaluran BKK tepat sasaran, meningkatkan kapasitas aparatur keuangan (pelatihan pembukuan dan SPJ), serta diadakan audit internal dan publikasi laporan ringkas kepada warga.

- 15.** Bagaimana dampak Pengelolaan bantuan Keuangan umum dan khusus Terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di Desa Kletek ?

Jawaban : tentu berdampak positif ya, seperti perbaikan sarana/prasarana (jalan paving, gorong-gorong, fasilitas olahraga), peluang kerja lokal saat pelaksanaan proyek.

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Gambar 4. 1 wawancara sekertaris Desa



Gambar 4. 2 wawancara Bendahara



Gambar 4. 3 wawancara Kaur Perencana

Lampiran 4 Surat Pra Penelitian

	YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1) PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN (S1) PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S2) PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI (S3) Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5931800 Ext 140, 141, E-mail: feb@untag-sby.ac.id	TERAKREDITASI TERAKREDITASI TERAKREDITASI TERAKREDITASI TERAKREDITASI
---	---	--

Nomor	: 2304/K/FEB/X/2025
Lampiran	: -
Perihal	: Permohonan Ijin Untuk Mengadakan Penelitian
Kepada	: Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Balai Desa Kletek di Sidoarjo. Jl Panglima Sudirman No 01 Menyanggong Kletek, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat,

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata I (S1), maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan Skripsi sebagai hasil penerapan pelajaran teori serta praktek yang diperoleh berdasarkan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak / Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama	: Dicky Satria Ananta Haqq
N. P. M	: 1222200194
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis / S1 Akuntansi
Alamat	: Tawang Sari Permai Block DD 11 Telp./HP. 082231455224

Guna melakukan penelitian pada :

Balai Desa Kletek di Sidoarjo

untuk memperoleh data sesuai dengan Skripsi yang sedang disusunnya dengan judul "Implementasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Umum Dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa. Studi Kasus Atas Dana Desa. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Serta Kompensasi Pembangunan Frontage Road Berdasarkan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2023 Di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo "

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



 Prof. Dr. Tri Ratnawati, MS, Ak, CA, CPA
 NPP. 20220.85.0043

Lampiran 5 Kartu Bimbingan


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Kampus II, Semolowaru 45 Surabaya 60119, Telp (031) 8933800 Fax 1406141 E-mail : feb@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN



SEMESTER
 Gasal / ~~Gesal~~
 2025 / 2026

Nama Mahasiswa / NIM : Derry Satrio A.21
 Nama Pembimbing : Dr. Mawidah Marasari, SE, MA
 Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Umum dan Khusus Kepada Desa Suci Keras Atas Desa Dasa Akeri Desa Dasa Basi
Hak Paten dan Revisi: Rata Rata Kompensasi Frontage Road

Mulai Program Skripsi : Semester Thn. Ak. Selesai Bimbingan Tanggal

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1	15 Sept 2025	Topik / judul	Revisi topik. Suplkan Bab 1	m. Derry
2	24 - Sept 2025	prop bab 1	Revisi minor. Suplkan bab 2	m. Derry
3	02 Okt 2025	Bab 2	Revisi	m. Derry
4	07 Okt 2025	Bab 1-3	Revisi minor	m. Derry
5	10 Okt 2025	Bab 1-3	Revisi minor	m. Derry
6	13 Okt 2025	Bab 1-3	Siap uji	m. Derry
7	24 NOV 2025	Bab 4	Sub Revisi Sub-tan	m. Derry
8	01 Des 2025	Bab 4-5	Revisi 4.3 penubahasan	m. Derry
9	02 Des 2025	Bab 1-5	ACC. Suplkan berkas sidang	m. Derry

Perpanjang I Surabaya,
 Semester :
 Th. Ak. :
 Paraf Kajar : (Nama dan tanda tangan Pembimbing)

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN TAMAN DESA KLETEK Jln. Panglima Sudirman No. 01 - Kletek Telepon. 031 - 99784965 Email : perdeskletek@gmail.com Website : http://sid.sidoarjokab.go.id/Taman/Kletek/	
Nomor : 000.9/253/438.7.7.16/2025 Sifat : Biasa Lampiran :- Hal : Selesi kegiatan Penelitian	Yth	Sidoarjo, 02 Desember 2025 Kepada Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus di Surabaya
Berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo nomor 000.9/5157/438.6.5/2025 tanggal 07 November 2025 perihal Rekomendasi penelitian/ survey/ Kegiatan atas : Nama : Dicky Satria Ananta Haqq Alamat : Tawangsari Permai DD 11 RT 02 RW 01 Desa Kletek NIM : 1222200194 Instansi : Univ 17 Agustus Surabaya / Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah selesai melakukan kegiatan Penelitian / wawancara di Pemerintah Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Demikian untuk menjadi periksa atas perhatian disampaikan Terimakasih		
PJ KEPALA DESA KLETEK,  MOHAMAD CHOLIS, S.Sos. Penata TK I NIP 196805301989101001 Ditandatangani secara elektronik oleh MOHAMAD CHOLIS, S. Sos NIP. 196805301989101001		
Tembusan : Yth. 1. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo 2. Kepala Bakesbangpol Kab. Sidoarjo 3. Camat Taman 4. Yang bersangkutan		
 Delapan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tudangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.		

Lampiran 7 Bukti Submit Jurnal



UNIVERSITAS 45 SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN : **MANAJEMEN & AKUNTANSI** (STATUS TERAKREDITASI)
 Komplek Gedung Juang 45 Jatim, Jl. Mayjen Sungkono 106 Surabaya
 Telp. (031) 5624940, Cp. (081) 6535759



SURAT KETERANGAN PENERBITAN JURNAL

Nomor : 13.2.21/FE/016/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ir. Achmad Daengs GS, SE.,MM.,Dipl.SM.**

Jabatan : **Pemimpin Redaksi Jurnal Ekonomika45**

Menerangkan bahwa Saudara :

Nama : **Dicky Satria Ananta Haqq, Maulidah Narastri**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah menyerahkan artikel yang layak untuk dipublikasikan.

Judul Artikel :

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN UMUM DAN KHUSUS
 KEPADA DESA. BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO 24 TAHUN 2023 DI
 DESA KLETEK KEC TAMAN KAB SIDOARJO**

Yang akan diterbitkan di Jurnal Ekonomika 45 **Volume 13. No. 2, Juni 2026.**
e-issn 2798-575X (online,) p-issn 2354-6581 (print)

Telah dicek melalui aplikasi Turnitin dan memenuhi syarat untuk diterbitkan.
 Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan
 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Desember 2025

Pemimpin Redaksi

Jurnal Ekonomika '45



Dr. Ir. Achmad Daengs GS, SE.,MM.,Dipl.SM.

NIRA.991510710161004814023

Lampiran 8 Hasil Turnitin Jurnal

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN UMUM
DAN KHUSUS KEPADA DESA. BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI NO 24 TAHUN 2023 DI DESA KLETEK KEC TAMAN KAB
SIDOARJO.docx

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	9%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	1%
2	journal.appihl.or.id Internet Source	1%
3	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1%
4	semnaskonsorsium.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
5	asndemak.blogspot.com Internet Source	1%
6	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
7	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
8	Rifa'i, Ahmad. "Rekontruksi Regulasi Pegelolaan dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
9	Heru Cahyono, Kurniasih Mufidayati. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN APBDES SASAKPANJANG KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2021 Publication	<1%
10	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%